

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berikut ini akan diuraikan tentang (a) Pengertian Manajemen; (b) Pembiayaan Pendidikan; (c) Sub Pokok bahasan Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat; bahasan Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM), pengalokasian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat, pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat; dan pelaporan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat.

##### **1. Pengertian Manajemen**

Secara umum manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Secara teoritis, setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberi arti secara universal yang dapat diterima oleh semua orang.

Menurut Stoner dan Freeman, manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Rohman dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan (Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif)*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2012, h.2

Engkoswara dan Ann Komariah, memberikan definisi : Manajemen adalah merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan, keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif dan efisien.<sup>10</sup> Menurut William Springel, *Management is that function of an interprise which concerns with the direction business and control of the various activities to attain the business objectives*. Dia memandang manajemen sebagai kegiatan perusahaan (yang mestinya dapat diterapkan bagi kegiatan non perusahaan juga), dan manajemen dipandang sebagai fungsi perusahaan berupa pemberian pengarahan dan pengendalian bermacam-macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.<sup>11</sup>

Terry memberikan definisi : *Management is a distinct prose is consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber manusia dan sumber lain.<sup>12</sup> Menurut Mutiara S.Panggabean dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 2

<sup>11</sup>Ibnu Syamsi, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Rosda Karya, 1994, h.

<sup>12</sup>Terry G.R., *Principles of Management*, Homewood, Richard D Irwin, INC, 1977, h. 4

manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan dan pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien.<sup>13</sup>

W.J.S. Poerwadarminta secara singkat menyebutkan, “manajemen adalah cara mengelola suatu perusahaan besar”.<sup>14</sup>

Nana Sujana mengatakan, bahwa manajemen adalah kepemimpinan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan baik bersama-sama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>15</sup>

Kemudian menurut Nanang Fattah, manajemen adalah suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, dengan mengaitkan proses dan manejer yang dihubungkan dengan aspek organisasi (orang-struktur-teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem.<sup>16</sup> Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan

---

<sup>13</sup>Mutiara S.Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Bojongkarta, Ciawi-Bogor Selatan, Ghalia Indonesia, 2004, h. 13

<sup>14</sup>W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Edisi III, Cet. IV, Balai Pustaka, 2007, h. 742.

<sup>15</sup>Nana Sujana, *Manajemen Program Pendidikan*, Bandung, Falah Production, 2004, h. 17.

<sup>16</sup>Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, Cet. VI, Remaja Rosda Karya, 2006, h. 1.

dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi.<sup>17</sup>

Selanjutnya Stoner seperti dikutip oleh Handoko dalam Husnul Yaqin menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Istilah manajemen dalam al-Qur'an mungkin tepat disebut sebagai "iddarah". Hal ini mengacu kepada firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :



Artinya : "...dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu...".<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Mamduh M. Hanafi, *Penuntun Belajar Manajemen*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1997, h. 5.

<sup>18</sup>Husnul Yaqin, *Kapita Selekta Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Banjarmasin, Cet. II, Antasari Press, 2011, h. 3.

<sup>19</sup>Q.S. Al-Baqarah [2] : 282.

Di dalam ayat tersebut, terdapat ungkapan “تدبرونها بينكم” yang berarti yang kamu jalankan diantara kamu. Asal katanya adalah ادبر Yang berarti menjalankan, mengelola atau mengatur. Kepala, direktur, manajer dalam bahasa Arab disebut مدير .

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menyatakan bahawa perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, karena kaum muslimin ketika turunnya ayat ini kepandaian tulis-menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan.<sup>20</sup>

Ayat di atas sesungguhnya menerangkan tentang persoalan yang berhubungan dengan urusan sesama manusia, yakni persoalan jual beli, transaksi atau persoalan kesekretariatan. Maka tidaklah heran apabila asal penemuan ilmu manajemen itu dari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan usaha atau bisnis, perdagangan, perniagaan atau perindustrian. Hal ini kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari setiap usaha kelompok untuk lebih terarah serta mudah mendapatkan keberhasilan. Lahirnya ilmu pengetahuan ini dipelopori oleh Frederick

---

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat Cet. I, Lentera Hati, 2000, h. 563-565.

Winslow Taylor tahun 1856-1915 dan Hendry Fayol tahun 1851-1925 dari Perancis.<sup>21</sup>

Dari penjelasan tentang manajemen di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dan pengarahan serta pengawasan dalam mengorganisasi anggota dan mempergunakan seluruh sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dapat juga dipahami sebagai proses kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

## **2. Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas.

Mekanisme pembiayaan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan, alternatif dan efektifitas. Pendekatan sistem dalam pembiayaan pendidikan dimulai dengan penerapan PPBS (*Planning Programming Budgeting Systems*) atau yang dikenal dengan istilah Sistem Penyusunan Program dan Anggaran (SIPPA).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Husnul Yaqin, *Kapita Selekta...*, h. 4.

<sup>22</sup>Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta Cet. I, 2014, h. 1.

Dalam pendekatan sistem, ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur eksternal yang mencerminkan suatu subsistem lingkungan yang lebih luas, dan unsur internal yang menggambarkan sistem itu sendiri. Subsistem eksternal mengandung masalah-masalah umum, sedangkan subsistem internal mencakup perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, administrasi program dan pengawasan program.<sup>23</sup>

Pendekatan sistem terhadap pembiayaan telah dimulai pada saat melakukan perencanaan dengan penentuan satuan-satuan biaya yang diperoleh dari hasil analisis biaya, sampai dengan pengawasan program dengan menentukan satuan biaya terhadap sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program. Hasil perhitungan biaya dapat dibandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar dan yang sama besar dengan mendasarkan kepada hasil pelaksanaan program. Di sinilah akan tampak tingkat efisiensi dan efektivitasnya.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jo. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik berdiri sendiri maupun bersama-sama.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 2.

Pada pasal yang lain disebutkan secara lebih jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik. Sedangkan biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya di tangan pemerintah dan masyarakat, sehingga penentuan aspek-aspek pendidikan dan biaya lebih banyak ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Dadang Suhardan dkk, menyatakan, pembiayaan pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.<sup>26</sup>

Harsono, secara singkat menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.<sup>27</sup>

Menurut sumbernya, pembiayaan pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis yaitu :

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>26</sup>Dadang Suhardan, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2012, h. 22

<sup>27</sup>Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, 2007, h. 9.



1. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa;
3. Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa;
4. Pembiayaan pendidikan dari lembaga pendidikan itu sendiri.<sup>28</sup>

Pada zaman dulu, pemerintah, masyarakat dan orang tua tidak dikenakan biaya pendidikan, karena biaya pendidikan dipikul oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Seorang Ustad, guru atau Kyai memiliki sumber pembiayaan pendidikan khusus, misalnya lahan pertanian dan perkebunan. Para siswa dan santri dilibatkan dalam pengolahan lahan pertanian dan perkebunan, kemudian hasilnya dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan mereka. Ketika zaman ini semakin maju, penduduknya makin padat, para penyelenggara pendidikan tidak mampu lagi membiayai pendidikan yang diselenggarakan, karena lahan dipindahkan kepada masyarakat, pemerintah dan bahkan donatur lain.<sup>29</sup>

Manuel Zmyman dalam Muhammad Rohman dan Sofan Amri mengemukakan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumbernya saja, tetapi juga penggunaan dana-dana secara efisien.<sup>30</sup>

Menurut Dadang Suhardan dkk, jenis biaya pendidikan dapat dikategorikan kedalam; biaya langsung (*direct cost*), biaya tak langsung (*indirect cost*), *privat cost*, *social cost* dan *monetary cost*.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 10.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 10.

<sup>30</sup>Muhammad Rohman & Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan..*, h. 268.

**a. Biaya Langsung (*direct cost*)**

Biaya pendidikan langsung (*direct cost*) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga siswa. Biaya langsung ini lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data sekolahpun tersedia, sementara itu biaya tidak langsung sulit untuk dihitung.

Biaya langsung, berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM), penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan dan biaya perawatan. Biaya langsung berpengaruh terhadap kualitas *output pendidikan* dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Di perguruan tinggi biaya ini digunakan untuk membiayai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kebanyakan biaya langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem sekolah itu sendiri, biaya ini dikeluarkan selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar, juga untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor. Keperluan lain yang dikeluarkan seperti untuk keperluan antara lain :

- a. Biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan belajar, alat peraga, bahan laboratorium dan pakaian praktik.
- b. Biaya transportasi/angkutan sekolah.
- c. Biaya buku pegangan guru dan buku di perpustakaan.
- d. Biaya UKS dan biaya penyelenggaraan *counseling*.
- e. Biaya mendatangkan guru tambahan/nara sumber.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Dadang Suhardan dkk, *Ekonomi*...h. 23.

**b. Biaya Tidak Langsung (*indirect cost*)**

Biaya tidak langsung (*indirect cost*), berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikan. Misalnya ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan dan biaya belajar tambahan.

**c. *Private Cost***

*Private cost* merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga, atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga siswa untuk keberhasilan belajar anaknya. Misalnya keluarga membayar guru les *private* supaya anaknya pandai bahasa Inggris dan matematika, keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anak pandai menggunakan komputer.

**d. *Social Cost***

*Social cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai segala keperluan belajar. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai wujud partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah dan orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah, orang tua dan masyarakat.

**e. *Monetary Cost***

Selain pengeluaran dalam bentuk uang atau materi, ada juga biaya yang harus dikeluarkan tidak dalam bentuk seperti itu, melainkan berbentuk jasa, tenaga dan waktu. Biaya semacam ini dapat dituangkan atau dinilai dan disetarakan dengan nilai uang. Biaya yang dikeluarkan semacam ini disebut biaya moneter atau "*Monetary Cost*".<sup>32</sup>

Dari pengertian manajemen dan pembiayaan pendidikan sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada hakekatnya manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap keseluruhan pembiayaan pendidikan. Baik yang bersifat uang maupun bukan uang yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.

Keberhasilan dalam pendidikan akan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, hal ini menempatkan bahwa pendidikan bagaimanapun membutuhkan investasi. Investasi yang dimaksudkan adalah investasi dalam bentuk uang yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan pendidikan, artinya bahwa pendidikan memang membutuhkan uang dalam nilai yang tidak sedikit. Pendidikan akan diperoleh bilamana dibiayai dengan cukup. Bila masyarakat menghendaki pendidikan seperti yang diinginkan, wajar sekali bila harus mengeluarkan uang senilai kualitas

---

<sup>32</sup>Dadang Suhardan dkk, *Ekonomi dan...*, h. 25

layanan belajar yang diperoleh. Tidak wajar bila layanan belajar yang buruk harus dibayar mahal.

Pendidikan dilihat dari sisi pendekatan ekonomi mengandung pengertian bahwa orang menginginkan untuk memperoleh pendidikan berupa layanan jasa yang bermutu, maka atas layanan jasa pendidikan tersebut orang harus membayarnya. Artinya bahwa kebutuhan yang harus dipenuhinya tersebut merupakan tanggung jawab yang membutuhkannya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan atas proses yang harus di jalankan dalam penyelenggaraannya menjadi tanggungan bersama terhadap orang-orang yang membutuhkannya.<sup>33</sup>

Kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau badan yang menyelenggarakan pendidikan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pengembangan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.<sup>34</sup>

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan yang harus dijalankan, terutama dalam kerangka pencapaian tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan sisi efektivitas dan efisiensi

---

<sup>33</sup>Dadang Suhardan dkk, *Ekonomi dan.*, h. 30.

<sup>34</sup>Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan.*, h. 84.

penyelenggaraan dengan tingkat produktivitas yang tinggi, maka peranan manajemen menjadi sangat besar sekali. Hal ini bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut mengikuti proses sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang harus dijalankan, seperti perencanaan dan pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasan serta pertanggung jawaban pendidikan.

### **3. Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat**

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa : “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik”.

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu adanya keterbukaan. Keterbukaan ini menyangkut keterbukaan tentang sumber penerimaan, jumlah pembiayaan yang diperoleh, sistem pengelolaan, pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut.

Secara umum pembiayaan (*financing*) adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, meperbesar modal kerja dan merencanakan kebutuhan masa datang akan uang.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Kompri, *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*, Bandung, CV ALFABETA, 2014, h. 225.

Manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan dan kontrol.<sup>36</sup>

#### **a. Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Sumber pembiayaan atau sumber keuangan sekolah/madrasah secara garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga sumber, sebagaimana diungkapkan oleh Sulistyorini yaitu :

- a. Pemerintah, baik pusat atau daerah yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan pendidikan.
- b. Orang tua Peserta didik.
- c. Masyarakat, baik mengikat atau tidak.<sup>37</sup>

Semua dana atau pembiayaan pendidikan yang diterima, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa dan mesyarakat, harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **b. *Planning* (Perencanaan) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM)**

Dalam kegiatan manajemen, perencanaan berarti keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses menyusun anggaran belanja Madrasah bagi orang yang mengetahui semua unsur organisasi. Keberhasilan perencanaan sangat menunjang keberhasilan kegiatan manajemen secara keseluruhan.

---

<sup>36</sup>Kompri, *Manajemen Sekolah..*, h. 231.

<sup>37</sup>Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 131.

Secara sederhana Planning (perencanaan) berarti merencanakan segala sesuatunya terlebih dahulu, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Menurut Kamal Muhammad Is dalam Husnul Yaqin, perencanaan adalah suatu pemikiran yang mantap terhadap suatu pekerjaan yang akan dilakukan, agar bentuk dan tahapan pelaksanaannya dapat berjalan menurut garis yang telah ditentukan dengan jelas, baik sasaran maupun caranya. Selanjutnya Handoko dalam Husnul Yaqin mengemukakan rencana atau perencanaan memungkinkan :

- a) Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan;
- b) Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih; dan
- c) Kemajuan terus dapat dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.<sup>38</sup>

Perencanaan yang baik menurut para pakar manajemen adalah sebagai berikut :

- a) Dibuat oleh orang-orang yang memahami organisasi;
- b) Dibuat oleh orang-rang yang memahami perencanaan;
- c) Disertai dengan rincian yang teliti;
- d) Tidak terlepas dari pemikiran pelaksanaan;
- e) Terdapat tempat pengambilan resiko;
- f) Sederhana, luwes dan praktis;
- g) Didasarkan pada keadaan nyata untuk masa kini dan masa depan;
- h) Dibuat bersama;
- i) Di rekomendasikan oleh penguasa/pimpinan tertinggi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Husnul Yaqin, *Kapita Selekta Administrasi..*, h. 9

<sup>39</sup>Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet II, 2006, h. 43.



Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa esensi perencanaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah adalah membuat atau merencanakan suatu program yang akan dilakukan dengan memperhitungkan biaya atau keuangan yang akan didapat.

### c. Realisasi dan Pembukuan

Realisasi pelaksanaan anggaran dalam konsep manajemen keuangan sekolah perspektif Islam berbentuk pembukuan. Semua penerimaan dan pengeluaran harus tercatat dan tertulis yang dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dimaksudkan supaya dapat membuat laporan keuangan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>40</sup>

Selain realisasi dan pembukuan, dalam sebuah manajemen harus ada pengorganisasian. Stephen P. Robbins mengemukakan beberapa tujuan pengorganisasian sebagai berikut :

- a. Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas dan departemen yang spesifik;
- b. Menugaskan pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan individu;
- c. Mengkoordinasikan beragam tugas organisasi;
- d. Menghimpun berbagai pekerjaan ke dalam unit-unit;
- e. Menjalin hubungan di antara individu, kelompok dan departemen;
- f. Membuat hierarki wewenang yang formal;
- g. Mengalokasikan dan menempatkan sumber-sumber daya organisasi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 38.

<sup>41</sup>Stephen P. Robbins, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 132.

Organizing merupakan faktor yang sangat menentukan dan erat kaitannya dengan perencanaan yang telah menjadi patokan, di dalam menggerakkan orang-orang guna mencapai tujuan. Karena kelompok itu sendiri terdiri dari beberapa orang yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya masing-masing, maka kerjasama yang terjadi antara semua itu merupakan keniscayaan.<sup>42</sup>

Dari uraian di atas, dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam pengorganisasian harus dilakukan apa yang disebut dengan "koordinasi", yaitu tindakan yang diambil oleh seorang manajer dalam kegiatan untuk mendapatkan kepastian dari perbedaan macam-macam pekerjaan, atau macam-macam orang yang bekerja. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan keadaan yang harmonis dan seimbang dalam mencapai hasil yang diharapkan.

**d. *Controlling* (pengawasan)**

Dalam suatu organisasi apapun termasuk lembaga-lembaga pendidikan, proses *controlling* (pengawasan) merupakan suatu yang harus ada dan dilaksanakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meneliti dan mengetahui apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semuanya sudah betul-betul dilaksanakan. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan dalam melaksanakan tugas-tugas dan sekaligus dapat mengetahui jika sekiranya terdapat segi-segi kelemahan. Dengan

---

<sup>42</sup>Husnul Yaqin, *Kapita Selekta Administrasi.*, h. 11.

demikian, hasil dari pada pengawasan dapat menjadi masukan bagi pemimpin untuk selanjutnya memberikan petunjuk yang tepat sesuai dengan perencanaan.

Abduraahman dalam Husnul Yaqin memberikan definisi pengawasan ini sebagai kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

Pengawasan anggaran merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan penyelewengan lainnya.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi tersebut controlling atau pengawasan adalah merupakan aktivitas yang dilakukan mengatur, memantau tata pelaksanaan yang direncanakan agar tidak terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan.

#### **e. Pelaporan penggunaan anggaran biaya pendidikan**

Pelaporan penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari sistem pengawasan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah-masalah atau hambatan-hambatan

---

<sup>43</sup>Husnul Yaqin, *Kapita selekta Administrasi...*, h. 17-18

<sup>44</sup>Kompri, *Manajemen Sekolah dan Praktek*, Bandung : Al-fabeta, 2014, h. 254.

yang dihadapi, dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan.

Laporan ini menurut Matin adalah untuk:

- a. Menginformasikan kemajuan, perkembangan nyata atau realisasi fisik dan keuangan baik rutin maupun pembangunan dalam suatu periode tertentu.
- b. Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan program kerja. rutin dan pembangunan dengan realisasinya hingga kurun waktu tertentu.
- c. Mengidentifikasi masalah yang timbul dan mengupayakan alternatif pemecahannya.
- d. Memberikan informasi yang dibutuhkan pimpinan dan menjadi masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat.<sup>45</sup>

Isi laporan harus dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan kebijaksanaan. Oleh karena itu, materi laporan harus akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan disampaikan tepat waktu. Agar laporan yang disampaikan efektif, maka laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis, disusun dan disajikan dalam bentuk format yang baku. Format laporan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan, mudah digunakan, dan dapat menampung data dan informasi yang penting.<sup>46</sup>

Dari uraian diatas laporan diperuntukan menggambarkan hasil pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan pembiayaan pendidikan. Secara garis besar, laporan penggunaan anggaran pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: laporan pelaksanaan proyek pembangunan, dan laporan pelaksanaan tugas dan

---

<sup>45</sup>Matin, *Manajemen...*, h. 208.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 209.

fungsi. Laporan pelaksanaan proyek pembangunan terdiri atas laporan bulanan dan laporan triwulan. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi terdiri atas laporan tengah tahunan dan laporan tahunan.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Dari hasil penelusuran, ada beberapa penelitian, jurnal dan artikel yang membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan, tetapi menurut penulis beberapa penelitian, jurnal dan artikel yang ditemukan tersebut belum menggambarkan secara jelas bagaimana sesungguhnya manajemen pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil *setting* penelitian yang berbeda agar mendapatkan karakteristik peningkatan manajemen di lembaga pendidikan swasta, yaitu Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Swasta Palangka Raya.

Penelitian ini memfokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Palangka Raya.

Diantara penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Rachman Firdaus.<sup>47</sup> Dengan judul Manajemen Pembiayaan pendidikan dan Mutu Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Swasta (Studi kasus di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella di Bandung). Dari hasil penelitian diketahui bahwa sistem pembiayaan yang efektif dapat mewujudkan pendidikan yang

---

<sup>47</sup>Rachman Firdaus, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Mutu Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Swasta*. (Studi kasus pada Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella di Bandung). Bandung, UPI, 2004.

bermutu dan menjamin kelangsungan hidup lembaga pendidikan swasta. Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari peserta didik merupakan potensi besar dalam melaksanakan manajemen pendidikan serta merupakan modal bagi keberlangsungan pendidikan. Sistem pengelolaan dan manajemen penggalan dana pembiayaan pendidikan supaya difokuskan pada upaya strategi kemitraan.

2. Tesis yang ditulis oleh Syamsudin.<sup>48</sup> Dengan judul Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan. Penelitian ini memaparkan bahwa biaya pendidikan berpengaruh terhadap mutu hasil belajar. Biaya dalam penelitian ini terbatas pada jenis biaya langsung dan tidak langsung terhadap proses belajar mengajar.
3. Tesis yang ditulis oleh Nasta'in Ahmad.<sup>49</sup> Dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bos dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjung Sari Tersono Batang. Ia memaparkan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan melalui dana Bos dalam meningkatkan mutu Madrasah harus dilaksanakan dengan cara transparan dan terencana baik perencanaan, penganggaran, penggunaan dan pengawasannya.

---

<sup>48</sup>Syamsudin, *Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan*, Medan, USU, 2009.

<sup>49</sup>Nasta'in Ahmad, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bos dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjung Sari Tersono Batang*, Semarang, IAIN Wali Songo, 2012

4. Sekripsi yang ditulis oleh M. Anis.<sup>50</sup> Dengan judul Manajemen Pembiayaan pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran. Penelitian ini memaparkan tentang sumber pembiayaan pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari masyarakat, hibah dan dari pemerintah (Bos).
5. Journal yang ditulis oleh Muhajirin.<sup>51</sup> Dengan judul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dari Partisipasi Masyarakat. Tulisan ini memaparkan bahwa seluruh pembiayaan pendidikan yang bersumber dari partisipasi masyarakat harus dikelola dengan sistem manajemen yang baik.

---

<sup>50</sup>M. Anis, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDIT Assalamah Ungaran*, Semarang,, UNNES, 2013.

<sup>51</sup>Muhajirin, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dari Partisipasi Masyarakat*, <http://Journal.Unnes.ac.id/sju/index.php/eduman>. vol 1 No. 02, 2012.